



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 07 Mei 2012

Halaman: 2

**Pelimpahan Wewenang
Jangan Jadi Bumerang**

JOGIA - Rencana Pemkot Jogja untuk melimpahkan beberapa wewenang kepada pejabat di tingkat wilayah yaitu kelurahan dan kecamatan menuai kritikan wakil rakyat. Kalangan anggota DPRD Kota Jogja khawatir jika tak diawasi kompetensi justru menjadi bumerang bagi pejabat tingkat bawah. Terutama menyangkut kewenangan anggaran, yang bisa berujung pada bukum.

Anggota DPRD Kota Jogja dari Komisi A Bambang Anjar Jalumurti menyarankan, pemkot benar-benar menyiapkan SDM untuk melaksanakan wewenang tersebut. Ini untuk menghindari adanya penyimpangan yang bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di kemudian hari.

"Perlu diperhatikan dengan serius, kemampuan mengelola anggaran ini harus menjadi modal utama," saran politikus asal PKS ini.

Bambang menuturkan, kesiapan pejabat di tingkat wilayah dalam mengelola anggaran merupakan hal mutlak sebelum rencana itu

Sedikit saja ada yang keluar jalur, pemkot wajah meluruskan."

BAMBANG A. JALUMURTI
Anggota DPRD Kota Jogja

diberlakukan. Sebab, saat ini aturan terhadap anggaran sangat ketat.

"Pengawasan juga ketat. Jangan sampai kebijakan yang baik malah merusak prestasi pemkot akibat ketidaksiapan aparatur wilayah," ujarnya.

Bambang juga memiliki dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu anggaran kewilayahan dan material. "SDM yang ditempatkan harus benar-benar berkualitas," tandasnya.

Penyiapan SDM tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan bagi petugas di wilayah

maupun menambah petugas yang sudah berkompeten. Terkait hal ini, Komisi A telah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Komisi A telah meminta agar pemkot mulai menyiapkan SDM yang berkompeten untuk hal tersebut. "Supaya jangan sampai ada temuan BPK," katanya.

Selain itu, penyaluran anggaran untuk wilayah yang otomatis akan bertambah, harus didasarkan pada Musrenbang sebelumnya. Sehingga target pembangunan di wilayah bisa tepat sasaran dan jauh dari pemborosan.

Bentuk kewenangan juga harus dimatangkan pemkot. Ini agar instansi dan dinas terkait yang beberapa programnya akan dilimpahkan kepada wilayah tak boloh setengah hati. "Nanti, tak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi. Sedikit saja ada yang

keluar jalur, pemkot wajah meluruskan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Jogja Wasesa mengungkapkan, untuk melakukan monitoring dan evaluasi akan dibentuk posko tersendiri. Pejabat di wilayah juga bisa melakukan konsultasi pembangunan melalui posko tersebut. Artinya, meski nanti dilimpahkan, SKPD terkait tidak akan lepas tangan.

Terhadap persoalan kesiapan SDM di tingkat wilayah, menurut Wasesa, BKD telah menyelenggarakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa bagi pejabat kecamatan dan kelurahan. Hasilnya, sebagian besar telah memiliki kecakapan untuk mengelola dana pembangunan.

"Soal pengelolaan anggaran ini, nantinya akan ada pendampingan langsung dari instansi terkait," katanya. (eri/tya)

an Kepada Yth. :
Walikota Yogyakarta
Wakil Walikota Yogyakarta
Sekretaris Daerah
sistem
in Kepada Yth. :

Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2.			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005